

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

6.1.1. Simpulan Umum

Terpinggirkannya keterlibatan bermakna dari nelayan tradisional sebagai warga negara dalam kebijakan tambang timah di perairan laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, mencerminkan prinsip-prinsip kewarganegaraan republikan yang tidak ditransformasi pada praktik kewarganegaraan. Hal terjadi akibat keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas organisasi nelayan tradisional, serta dominasi aktor-aktor eksternal seperti perusahaan tambang dan pemerintah daerah. Implikasinya, nelayan tradisional Desa Batu Beriga sebagai kelompok terdampak kebijakan tambang timah di laut mengalami kesulitan dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kolektif mereka. Padahal, keterlibatan aktif dari warga negara dapat menghasilkan kebijakan publik yang inklusif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai *civic virtue*, *common good*, dan *public deliberation* dalam sebuah kebijakan publik. Kondisi ini menegaskan bahwa model pelibatan warga negara yang berkeadilan dan partisipatif masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir seperti Desa Batu Beriga yang rentan secara ekologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan tambang timah di laut yang menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, perlu penguatan kapasitas warga negara untuk mendukung keterlibatan yang bermakna dan berkelanjutan dalam kebijakan bagi kelompok nelayan tradisional.

6.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap temuan-temuan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan khusus yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas keterlibatan nelayan tradisional di Desa Batu Beriga dalam kebijakan publik merupakan hasil dari pendidikan kewarganegaraan non-

formal yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, yakni WALHI Bangka Belitung, bukan oleh negara. Kekosongan peran pemerintah ini diisi secara efektif oleh WALHI Bangka Belitung melalui pendampingan intensif, diskusi, dan pengorganisasian aksi. Proses ini berhasil mentransformasikan nelayan tradisional dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek politik yang berdaya. Transformasi ini terbukti melalui peningkatan tiga kompetensi inti kewarganegaraan, yaitu: a) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkembang dari pemahaman adat menjadi literasi kebijakan yang kritis; b) sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) berubah dari respons anarkis menjadi komitmen pada jalur demokratis dan damai dengan solidaritas komunal yang kuat; serta c) keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meningkat secara praktis dalam hal pengorganisasian massa, argumentasi terstruktur, dan kemampuan negosiasi melalui tim perwakilan.

2. Kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga, secara fundamental telah mendistorsi hak-hak konstitusional nelayan tradisional sebagai warga negara. Pelanggaran ini terjadi dalam dua aspek utama, yaitu: a) pertama, perampasan hak-hak sipil dan politik melalui proses perumusan kebijakan yang tertutup dan meniadakan keterlibatan aktif, serta melanggar hak atas informasi dan rasa aman kelompok masyarakat nelayan tradisional Desa Batu Beriga sebagai warga negara; b) Kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga memberikan ancaman terhadap hak sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana mata pencaharian mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional menjadi terancam, ekosistem laut yang bernilai konservasi tinggi berpotensi rusak, serta hak-hak masyarakat adat beserta kearifan lokal "*Taber Laot*" terkikis. Selain itu, kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga menciptakan dilema kewajiban bagi nelayan tradisional karena memaksa mereka memilih antara mematuhi hukum formal yang cacat legitimasi atau memenuhi kewajiban moral-ekologis untuk menjaga laut. Pada akhirnya, terjadi pergeseran beban kewajiban dari negara kepada warga negara, di mana masyarakat nelayan tradisional dipaksa untuk menanggung sendiri konsekuensi kerusakan lingkungan dan mencari alternatif penghidupan baru.

3. Kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga telah gagal dalam menjalankan prinsip-prinsip esensial republikanisme. Kegagalan pelibatan langsung dan bermakna dalam proses perumusan kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga akibat berlangsung pada ruang tertutup merupakan pengingkaran terhadap prinsip kewarganegaraan republikan. Kegagalan negara melibatkan kelompok nelayan tradisional dalam kebijakan penambangan timah di laut Desa Batu Beriga telah munculnya kontestasi pemaknaan kepentingan bersama (*common good*). Versi negara dengan paradigma pembangunan ekstraktif yang lahir dari tidak adanya proses deliberasi publik, sehingga kehilangan legitimasi. Sebaliknya, versi kelompok masyarakat nelayan tradisional Desa Batu Beriga yang secara holistik berpegang pada paradigma keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi. Pandangan ini lebih mencerminkan *common good* yang otentik. Akibatnya, kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga lebih melayani kepentingan partikular korporasi daripada kehendak umum. Di tengah kegagalan negara menghadirkan keterlibatan aktif warga negara untuk melahirkan kebijakan publik berlandaskan kepentingan bersama, kebajikan sipil (*civic virtue*) secara paradoks justru bangkit dari komunitas nelayan tradisional Desa Batu Beriga. Solidaritas komunal yang kuat, kesadaran moral kolektif untuk menjaga laut demi generasi mendatang, serta aksi-aksi damai yang terorganisir adalah manifestasi dari kebajikan sipil (*civic virtue*) warga negara yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pada konteks kasus ini, nelayan tradisional Desa Batu Beriga menjadi penjaga republik (*res publica*) yang sesungguhnya, sementara institusi negara justru berpihak pada kepentingan sektoral.

6.2. Implikasi

Novelty utama dari penelitian ini terletak pada pergeseran perspektif analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dominan berfokus pada dampak ekologis dan sosio-ekonomi pertambangan timah di laut, ke sebuah kajian mendalam berdasarkan perspektif Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menempatkan nelayan tradisional dalam penelitian mengenai tambang timah di laut Pulau Bangka, sebagai

korban terdampak kebijakan secara ekonomi ataupun lingkungan. Sedangkan penelitian ini memposisikan kelompok nelayan tradisional sebagai aktor politik dan subjek dari konsep kewarganegaraan.

Penggunaan perspektif tersebut dalam penelitian ini, menjadikan novelty dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, penelitian ini tidak hanya melihat konflik di Desa Batu Beriga sebagai sengketa sumber daya alam semata, melainkan sebagai manifestasi dari krisis kewarganegaraan yang lebih luas, di mana hak-hak formal warga negara terdistorsi oleh kebijakan negara yang eksklusif. Kedua, melihat perjuangan kolektif nelayan tradisional sebagai sebuah proses Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) otentik dalam dimensi sosio-kultural. Pandangan ini adalah sebuah pendekatan baru yang melihat ruang konflik sebagai laboratorium pembentukan warga negara baik dan cerdas (*good and smart citizen*), di luar konteks pendidikan formal di sekolah. Ketiga, penelitian ini secara empiris menerapkan teori kewarganegaraan republikan untuk mendiagnosis kegagalan tata kelola negara dalam membangun keterlibatan aktif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*), serta menyoroti kebangkitan kebajikan sipil (*civic virtue*) secara paradoksal dari kelompok masyarakat tereksklusifkan. Novelty-novelty dari penelitian ini kemudian memberikan implikasi baik secara teoritis terhadap pengembangan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan, maupun secara praktis bagi para pembuat kebijakan dan aktivis masyarakat sipil.

6.2.1. Implikasi Teoritis

1. Memperluas dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini membuktikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) paling transformatif seringkali terjadi di ruang yang diklaim atau dibuat (*claimed/created spaces*), di mana warga belajar tentang hak, kekuasaan, dan demokrasi melalui praktik perjuangan politik secara langsung. Hasil penelitian ini menyoroti peran krusial lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI sebagai fasilitator Pendidikan Kewarganegaraan non-formal.
2. Memperkuat konsep kewarganegaraan sebagai praktik. Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ketika status kewarganegaraan formal gagal memberikan hak-hak substantif, pada dasarnya kewarganegaraan tidak mati. Hal

ini disebabkan karena kewarganegaraan dipraktikkan sebagai sebuah perjuangan atas klaim hak warga negara. Komunitas nelayan tradisional Desa Batu Beriga secara aktif mengkonstruksikan praktik kewarganegaraan mereka melalui aksi kolektif, deliberasi internal, dan klaim atas ruang publik untuk menantang pandangan kewarganegaraan yang statis dan legalistik.

3. Mengkontekstualisasikan Teori Kewarganegaraan Republikan. Penelitian ini menunjukkan sebuah ironi dari negara yang seharusnya menjadi penjaga urusan publik (*res publica*), justru bertindak mendukung kepentingan sektoral. Sebaliknya, warga negara yang termarginalkan justru menjadi aktor yang memperjuangkan kepentingan bersama (*common good*) dan mempraktikkan kebajikan sipil (*civic virtue*). Hal ini memperkaya kajian ilmu kewarganegaraan tentang bagaimana prinsip-prinsip republikan dapat hidup dan dipraktikkan oleh warga negara biasa di tengah kegagalan institusional negara.

6.2.2. Implikasi Praktis

1. Ketidakhadiran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas keterlibatan warga negara dalam kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga, menjadikan kelompok nelayan tradisional tidak memahami hak dan kewajibannya, serta tidak memiliki kecakapan untuk terlibat secara substantif dalam perumusan kebijakan publik.
2. Terdistorsinya hak-hak dan kewajiban nelayan tradisional Desa Batu Beriga sebagai warga negara akibat kebijakan tambang timah di laut, berpotensi membuat mereka terjebak dalam kondisi yang termarginalkan. Hal ini disebabkan karena kelompok nelayan tradisional Desa Batu Beriga terpaksa harus berdampingan dengan kebijakan yang mendistorsi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
3. Kebijakan tambang timah di laut Desa Batu Beriga yang jauh dari prinsip-prinsip Republikanisme, menjadikan praktik kewarganegaraan yang eksklusif bagi kelompok nelayan tradisional.

6.3. Rekomendasi

6.3.1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Mengembangkan model Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan seperti nelayan tradisional, baik secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI Bangka Belitung untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) melalui kegiatan seperti sosialisasi, FGD, hingga pelatihan. Hal ini disebabkan karena warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) dapat mendukung pelaksanaan kehidupan bernegara yang partisipatif sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung khususnya Gubernur dan DPRD harus meninjau ulang dan merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil, dengan berfokus pada evaluasi menyeluruh mengenai alokasi zona tambang di wilayah bernilai konservasi tinggi dan krusial bagi penghidupan masyarakat pesisir seperti Desa Batu Beriga.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung khususnya Gubernur dan DPRD harus melakukan moratorium dan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap legalitas IUP dan PKKPR di perairan Desa Batu Beriga. Proses evaluasi tersebut harus melalui konsultasi publik yang otentik dan deliberatif dengan pihak-pihak representatif seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan terkait agar dapat mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok rentan seperti nelayan tradisional.
4. Mengembangkan dan melembagakan model pelibatan warga negara dalam perumusan kebijakan publik yang bermakna, representatif, dan akomodatif seperti diskusi publik, audiensi, hingga advokasi dengan kelompok masyarakat. Model keterlibatan tersebut harus secara formal mengakomodasi hak-hak adat, mengintegrasikan kearifan lokal, dan menciptakan mekanisme pembagian wewenang yang adil antara negara dan kelompok masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan publik.

6.3.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (WALHI Bangka Belitung)

1. Mereplikasi model Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) yang efektif di Desa Batu Beriga kepada komunitas masyarakat rentan lain untuk menghadapi persoalan serupa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan modul pelatihan terstruktur mengenai literasi hukum, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian komunitas masyarakat rentan.
2. Kegiatan-kegiatan pendampingan bagi kelompok masyarakat rentan, tidak dipandang hanya semata-mata dalam rangka perlawanan terhadap kebijakan publik yang mengancam kepentingan mereka. Akan tetapi, juga sebagai proses Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kelompok masyarakat rentan yang berdaya agar mampu secara mandiri mengadvokasi kepentingan mereka dalam kehidupan politik.

6.3.3. Masyarakat dan Komunitas Lokal di Desa Batu Beriga

1. Kelompok masyarakat harus memperkuat kelembagaan internal organisasi komunitas lokal seperti kelompok nelayan tradisional dan lembaga adat sebagai wadah untuk mengadvokasi aspirasi kelompok dalam perumusan kebijakan publik.
2. Kelompok masyarakat tradisional harus secara sistematis mendokumentasikan dan mengadvokasikan pengakuan formal terhadap hak-hak adat dan nilai-nilai tradisi menjadi landasan hukum untuk melindungi ruang hidup mereka dari ancaman industri ekstraktif di masa depan. Hal ini disebabkan karena pengakuan terhadap hak kelompok masyarakat sebagai warga negara dalam praktik kewarganegaraan, harus melalui proses perjuangan klaim terhadap hak.
3. Kelompok masyarakat harus terus memperluas jaringan sosial, seperti membangun aliansi strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, serta komunitas lain yang menghadapi problematika terhadap eksistensi hak-hak sebagai warga negara untuk memperkuat posisi tawar dan jangkauan advokasi. Selain itu, upaya ini sebagai langkah untuk membangun warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) melalui proses Pendidikan Kewarganegaraan dari internal kelompok masyarakat.

6.3.4. Civitas Akademika PKn

1. Civitas akademika Pendidikan Kewarganegaraan dapat menggunakan studi kasus konflik kepentingan di Desa Batu Beriga untuk mengembangkan materi ajar dan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yang lebih kontekstual, kritis, dan relevan dalam pendidikan formal.

6.3.5. Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini mendorong peneliti selanjutnya dari bidang Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi penelitian dalam scope Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya untuk melakukan penelitian pengembangan model Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) bagi kelompok masyarakat rentan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rekomendasi awal untuk penelitian pengembangan model pelibatan warga negara dalam kebijakan publik yang partisipatif, efektif, dan akomodatif.